

ABSTRAK

Tulisan ini dilatar belakangi bahwa Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang disebut juga Perda Pemberantasan pelacuran merupakan aktor utama dalam menegakkan perda.

Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah penegakan Peraturan Daerah dapat mencapai tujuan Otonomi Daerah, Apakah peran Satpol PP Kabupaten Batang dalam menegakan Perda Nomor 4 Tahun 2015 dapat mencapai tujuan otonomi daerah di Kabupaten Batang, Apa saja kendala dan bagaimanakah solusi dalam penegakan Peraturan Daerah. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian non doktrinal yang dapat dikategorikan kedalam penelitian kualitatif yang diharapkan mendapatkan data yang mendalam dan data yang mengandung makna.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama Dilihat kewenangan daerah otonom yang berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Maka penegakan perda dapat mencapai tujuan otonomi daerah. Kedua, Peran Satpol PP Kabupaten Batang dalam Penegakkan perda pemberantasan pelacuran dengan menjalankan tindakan preemtif, tindakan Preventif dan tindakan Represif sudah mencapai tujuan otonomi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Batang. Ketiga, Kendala yang dihadapi dalam penegakan peraturan daerah meliputi : kurangnya PPNS, keterbatasan anggota Satpol PP, keterbatasan Sarana dan Prasarana, masih banyaknya WPS di lapangan dengan alasan ekonomi, tempat hiburan kafe karaoke, panti pijat dan warung pinggir jalan menjadi pelacuran terselubung, bocornya informasi ketika melakukan razia, kelemahan dilidik awal, Belum adanya tempat penampungan WPS yang terjaring razia, masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat, Peran Kasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan yang belum optimal. Solusi dalam penegakan perda melalui solusi internal dan eksternal. Solusi internal: kualitas SDM Satpol PP, meningkatkan Sarana dan Prasarana, pembentukan Peraturan Daerah tentang Trantibum, pengiriman PPNS, Meningkatkan anggaran. Kemudian Solusi eksternal meliputi: Pemerintah daerah Kabupaten Batang harus mempunyai tempat penampungan WPS baik rumah singgah maupun panti rehabilitasi, Dinas Sosial harus mempunyai tenaga Pembina WPS, sosialisasi secara berkala, peran Kasi trantib Kecamatan, serta dukungan dari aparat Kepolisian dan Kodim Batang.

Kata Kunci : Penegakan Peraturan Daerah, Pelacuran, Satpol PP

ABSTRACT

This paper is based on the background of Satpol PP in enforcing Batang Regency Regulation Number 4 Year 2015 on the Amendment to Batang Regency Local Regulation Number 6 Year 2011 on the Eradication of Prostitution in Batang Regency is also called Perda Eradication of prostitution is the main actor in enforcing the local regulations.

The formulation of this research problem is whether the enforcement of Local Regulation can achieve the objectives of Regional Autonomy, Is the role of Satpol PP Batang Regency in enforcing the Local Regulation No. 4 of 2015 can achieve the purpose of regional autonomy owned by Batang Regency, What are the constraints and how the solution in enforcing the Local Regulation. This research method uses non-doctrinal research type which can be categorized into qualitative research which is expected to get deep data and meaningful data.

The results of the research show that, firstly, the authority of the autonomous regions has the right to regulate and manage their own government affairs and the interests of the local community. Thus the enforcement of local regulations can achieve the objectives of regional autonomy, Secondly, the Role of Satpol PP of Batang Regency in the enforcement of local regulations for the eradication of prostitution by carrying out preemptive action, Preventive action and Repressive action has reached the goal of regional autonomy owned by Batang Regency. Thirdly, the obstacles faced in enforcing local regulations include the lack of PPNS, the limited personnel of Satpol PP, the limited facilities, there are still many WPS in the field for economic reasons, karaoke cafe entertainment venue, massage parlor and roadside stalls into disguised prostitution, conducting raids, weak in initial investigation, the absence of shelter house WPS that netted raids, still low awareness and participation of the community, Role sub districts Kasi trantib not yet optimal. Solutions in enforcement of local regulations through internal and external solutions. Internal Solution: Human Resource Quality Satpol PP, Increasing Facilities and Infrastructure, establishment of Local Regulation on trantibum, delivery of PPNS, Increasing budget. Then the external Solution includes: Local Government of Batang Regency must have shelter of WPS both shelter house and rehabilitation institution, Dinas sosial should have a WPS builder, socialization periodically, Role sub districts Kasi trantib, also support from Police and Batang Regency army.

Keyword: Enforcement of Local Regulation, Prostitution, Satpol PP